

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Penanggung Jawab
Djustiawan Widjaja
(Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara)

Tim Penulis:
Sukmalalana
Yunita Romauli Nababan
Tri Purwita Sari

Evaluasi Program Kampung Iklim (Proklam) Dalam menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia

Isu Strategis

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari berbagai aktivitas manusia menyebabkan radiasi yang terperangkap di atmosfer juga meningkat yang berdampak pada kenaikan suhu bumi atau yang disebut dengan pemanasan global. Berdasarkan data *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), peningkatan suhu permukaan global untuk periode tahun 2011-2020 adalah sebesar 1,09 (0,95-1,20) °C (IPCC, 2022). Pemanasan global memicu adanya perubahan iklim yang menimbulkan beragam dampak merugikan terhadap ekosistem dan sistem kehidupan manusia berupa kelangkaan air, menurunnya produksi pangan, wabah penyakit, meningkatnya risiko bencana akibat iklim seperti kekeringan, banjir, longsor dan erosi, kerusakan infrastruktur dan penurunan ekonomi.

Salah satu kasus dampak perubahan iklim yang baru saja terjadi di Indonesia adalah gagal panen tanaman padi di Tapanuli Selatan pada November 2022. Tingginya curah hujan menyebabkan banjir yang merendam ±317 ha sawah dan 110 hektar diantaranya dilaporkan gagal panen. Apabila kejadian yang sama terjadi di beberapa wilayah maka dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan nasional. Menurut Menteri Keuangan, gangguan pada rantai pasokan nasional akibat dari bencana perubahan iklim dapat menimbulkan inflasi yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang besar. Indonesia disebutkan berpotensi mengalami kerugian ekonomi sebesar 112,2 T atau setara dengan 0,5% dari PDB pada tahun 2023.

Mengingat perubahan iklim berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan, upaya pengendalian perubahan iklim sudah sewajarnya melibatkan seluruh pihak mulai dari pemerintah baik pusat dan daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat umum. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup (KLHK) telah menginisiasi Program Kampung Iklim (Proklam) sejak tahun 2012. Proklam merupakan suatu program nasional yang melibatkan peran aktif multi-pihak seperti Pemerintah, masyarakat umum, pihak swasta maupun perguruan tinggi dan lembaga non-pemerintah dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak serta memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah (KLHK, 2017). Proklam sendiri menjadi wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK dan menahan kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2 °C sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement* tahun 2015.

2023

Komisi IV

Unsur utama Proklam adalah adaptasi dan mitigasi. Adaptasi perubahan iklim merupakan rangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri terhadap dampak perubahan iklim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat berkurang, sedangkan mitigasi perubahan merupakan rangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK. Adapun upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Proklam diwujudkan dalam aksi sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:



Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2021

Permasalahan

Berdasarkan data KLHK yang disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK, hingga akhir tahun 2022 terdapat 4.690 lokasi kampung iklim yang terdaftar di Indonesia, jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 dimana terdapat 3.270 kampung iklim yang terdaftar. Meskipun mengalami peningkatan, jumlah kampung iklim masih jauh dari target yakni 20.000 kampung iklim di tahun 2024. Artinya realisasi Proklam baru mencapai 23,45% atau terdapat gap sebanyak 15.320 kampung iklim yang harus terbentuk pada tahun 2023 dan 2024.

Ditinjau dari alokasi anggaran, dukungan APBN untuk Proklam pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah Rp. 1,1 Milyar, Rp. 4 Milyar dan 3 Milyar (anggaran tersebut adalah anggaran pusat dan UPT sebelum dilakukan *refocusing* anggaran). Untuk pengumpulan data dukung dalam registrasi diperlukan kurang lebih Rp. 2 juta per lokasi, artinya dibutuhkan Rp. 30.640.000.000,- pada tahun 2023 dan 2024 untuk mencapai target 20.000 kampung iklim. Sementara anggaran Proklam di tahun 2023 hanya sebesar Rp. 3,8 milyar, artinya dana yang dibutuhkan untuk mencapai target juga tidak memadai.

Ditinjau dari pelaksanaan, kegiatan Proklam yang saat ini tengah berjalan tergolong sangat sederhana seperti menanam pohon dan membersihkan sampah dan merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat berupa kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), padahal masih banyak kegiatan lain yang ramah iklim yang memiliki *output* yang lebih kaya dan berdaya guna. Contohnya, kegiatan Proklam yang dilaksanakan oleh Pemkab Buleleng selaku penerima tropi Proklam utama tahun 2021 berupa pengolahan limbah kotoran kambing menjadi pupuk kompos dan membuat pupuk cair dari ampas kopi.

Tantangan lain dalam Proklam adalah pro-kontra yang timbul di masyarakat yang menghambat peningkatan kontribusi dan kesinambungan Proklam di tingkat tapak. Beberapa kampung melakukan kegiatannya hanya menuju penilaian saja. Hal ini dikarenakan dampak dari Proklam tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga menurunkan semangat masyarakat dalam menjalankan Proklam.

Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Proklim dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada kehidupan masyarakat, komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) untuk:

- Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk membentuk kampung iklim di tingkat tapak. Sosialisasi pentingnya Proklim perlu dikemas dengan baik dan mudah dipahami sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga target 20.000 kampung iklim di 2024 dapat tercapai;
- Redesain kegiatan aksi dalam Proklim agar lebih berdaya guna dan berkontribusi dalam penurunan emisi GRK. Dalam hal ini perlu pendampingan dan dukungan teknis dari KLHK agar kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Pemberian apresiasi atas inovasi Proklim juga perlu disertai dengan pengawasan berkala untuk memastikan inovasi dilaksanakan secara berkelanjutan;
- Optimalisasi anggaran untuk mendukung Proklim yang sudah ada melalui dan pembentukan kampung iklim yang baru.

Komisi IV DPR RI mengharapkan KLHK meningkatkan intervensinya terhadap pelaksanaan Proklim di tingkat tapak supaya target Proklim tidak hanya berorientasi terhadap jumlah namun berorientasi pada upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim demi kehidupan yang lebih baik.

Referensi

Antaraneews.com. (2022, November 12). Retrieved from Antara Sumut: <https://sumut.antaraneews.com/berita/508181/ratusan-hektare-pertanian-di-tapsel-gagal-panen-dampak-perubahan-iklim>

IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the sixth Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change*. USA.

Kementerian Keuangan. (2022, September 14). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ancaman-Krisis-Iklim-Dapat-Lebih-Luas-Dari-Pandemi>

KLHK. (2017). *Road Map Program Kampung Iklim (Proklim)*. Jakarta: Ditjen PPI.

KLHK. (2022). *Laporan Kinerja 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Biro Perencanaan KLHK.